

Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Refomasi

Raden Maisa Yudono, Nurmasari Situmeang, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
radenmais@gmail.com, nurmasari_situmeang@upnvj.ac.id, wiiwiek.rukmi@upnvj.ac.id

Abstract: *Since the reformation of 1998, ethnic Chinese in Indonesia began to dare to declared their "jatidirinya" after more three decades of experiencing various discriminatory treatment, through Presidential Decree no. 6/2000, ethnic Chinese in Indonesia have freedom in practicing Chinese culture and participate in national politics. The ethnic Chinese participation in national politics is seen in their participation in various social and political organizations at local and national level. Yet twenty years after the reformation, changes in national politics and economics have had an impact on ethnic Chinese political participation. Therefore, the focus of this paper is to describe the ethnic Chinese participation in national politics and its changes especially post-reformation. The purpose of the study is to explain the changing role of ethnic Chinese in national politics. This research used document study method with qualitative approach. The findings of this research are, increasing ethnic Chinese role on various social-politics organization and more freedom for ethnic Chinese to canalize their political rights.*

Keyword: *Ethnic Chinese; National Politics; Participation.*

Abstrak: Sejak reformasi 1998 bergulir, etnis Tionghoa pun mulai berani bangkit menyatakan "jatidirinya" setelah lebih tiga dasawarsa mengalami berbagai perlakuan diskriminatif, melalui Keputusan Presiden No. 6/2000, etnis Tionghoa di Indonesia memiliki kebebasan dalam mempraktekkan budaya Tionghoa dan berperan serta dalam politik nasional. Peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional terlihat dalam keikutsertaan mereka dalam berbagai organisasi sosial politik di tingkat lokal maupun nasional. Namun duapuluh tahun setelah reformasi, perubahan dalam politik dan ekonomi nasional memberikan dampak bagi peran serta politik etnis Tionghoa. Oleh karena itu, fokus dari tulisan ini adalah memaparkan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional dan perubahannya terutama pasca refomasi. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan perubahan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ialah peran serta etnis Tionghoa semakin meningkat dan memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak politiknya ke berbagai oganisasi kemasyarakatan.

Kata kunci: Etnis Tionghoa; Politik Nasional; Partisipasi.

Pendahuluan

Faktor sejarah merupakan salah satu penentu atas peran etnis Tionghoa dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Peran mereka telah dimulai semenjak perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara berjalan. Masyarakat Tionghoa telah mendiami wilayah pesisir di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. Bahkan masyarakat Tionghoa ditunjuk oleh penguasa-penguasa lokal sebagai pedagang perantara untuk menghindari terjadi konflik antara penguasa lokal maupun mencegah terjadinya kompetisi antara penguasa lokal dalam perdagangan komoditas nusantara (Reid, 1992:497). Tekanan dari luar membuat masyarakat etnis Tionghoa pun memfokuskan kiprahnya pada bidang ekonomi saja.

Peran ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia semakin menguat saat pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan tentang pengelompokan penduduk Indonesia (Hindia Belanda) menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah masyarakat Eropa yang menempati golongan atas, kelompok kedua adalah Timur Jauh yang terdiri dari etnis Tionghoa, Arab dan Jepang yang menempati golongan menengah dan golongan ketiga adalah masyarakat asli Indonesia (Suryadinata, 1993b:83). Pengelompokan ini berubah saat masyarakat Jepang dimasukkan menjadi golongan atas setelah kemenangan Jepang atas Rusia pada perang Rusia-Jepang di tahun 1904.

Walaupun memegang peran-an vital dan penting dalam perekonomian, etnis Tionghoa selalu menjadi minoritas kecil di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional yakni 1930, menurut kajian Ananta dan kawan-kawan tahun 2008, diperkirakan hanya 2,03% dari total populasi penduduk Hindia Belanda. Pada tahun 2000 dan 2010, jumlah masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia hanya mencapai 1,2% dari total populasi penduduk Indonesia (Ananta et al., 2013:14).

Status sebagai minoritas membuat masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang diskriminasi. Pada masa Presiden Soeharto (1967-1998), perilaku diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa terlihat begitu kuat dikarenakan kebijakan negara yang mendorong terjadinya asimilasi etnis Tionghoa ke dalam etnis Indonesia asli, memerintahkan etnis Tionghoa untuk meninggalkan identitas budaya mereka namun pada waktu yang bersamaan pemerintah tetap melakukan stigma sebagai etnis Tionghoa. Serta melakukan larangan bagi etnis Tionghoa untuk berkiprah di bidang politik, pemerintahan, militer dan memasuki pendidikan tinggi negara (perguruan tinggi negeri). Bahkan pemerintahan Orde Baru melarang segala bentuk identitas budaya Tionghoa dalam ruang publik dan melakukan asimilasi ke dalam identitas budaya Indonesia.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1998, memberikan perubahan besar di Indonesia. Seiring dengan perubahan kehidupan sosial-politik di seluruh

Indonesia, dari otoritarianisme ke demokrasi, masyarakat etnis Tionghoa pun mulai berani menunjukkan identitas budaya mereka sebagai etnis Tionghoa. Begitu banyak masyarakat etnis Tionghoa yang semula apolitik dan antipolitik serentak memperjuangkan hak-hak yang dicabut selama rezim Orde Baru (Lan, 2010:26). Sejak reformasi 1998 bergulir, masyarakat etnis Tionghoa memang mulai berani bangkit menyatakan "jatidirinya" setelah lebih tiga dasawarsa mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dengan kekeliruan penyamarataan *stereotype* kelompok, stigmatisasi kultural dan pemandulan partisipasi politik. (Kusuma dan Satya, 2006:55)

Pasca Reformasi 1998, etnis Tionghoa tidak perlu gentar lagi untuk berkecimpung di dunia politik Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan juga kemerdekaan dalam berpolitik seperti tertuang dalam pasal 27 ayat 1-3. Salah satu contoh kegiatan berpolitik adalah keikutsertaan dalam pemilu. Oleh karena itu fokus dari tulisan ini adalah memaparkan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional dan perubahannya terutama pasca reformasi. Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan perubahan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional.

Kajian tentang peran masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia dalam bidang politik telah lama berkembang. Studi oleh Leo Suryadinata pada tahun 2003 berjudul "*Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa : Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*", memfokuskan pada bertahannya identitas masyarakat

etnis Tionghoa selama masa Orde Baru dan saat reformasi identitas itu pun menjadi lebih bebas diaktifkan oleh masyarakat etnis Tionghoa. Suryadinata juga mengungkapkan bahwa terjadi perubahan pada kebijakan-kebijakan negara atas etnis Tionghoa namun konsepsi dan persepsi masyarakat etnis Indonesia asli terhadap etnis Tionghoa masih belum banyak berubah sehingga untuk menuju masyarakat Indonesia yang multikultur masih perlu perjalanan panjang. (Suryadinata, 2003:11).

Kajian tentang peran etnis Tionghoa dalam politik nasional Indonesia pun menjadi pembahasan Charlotte Setijadi yang berjudul "*Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification*" yang diterbitkan oleh ISEAS. Setijadi menyimpulkan bahwa setelah dua dekade reformasi, masyarakat etnis Tionghoa tidak lagi mendapatkan perilaku diskriminasi, pemaksaan asimilasi dan munculnya fenomena '(re)Sinification' atau kembali ke budaya Tionghoa. Secara politis masyarakat etnis Tionghoa mendapatkan peluang yang besar untuk berkiprah di dunia politik namun karena ketiadaan persamaan pendapat maupun orientasi politik maka etnis Tionghoa pun memiliki pandangan politik dan aspirasi politik yang berbeda pula (Setijadi, 2016:1).

Sementara Ari Ganjar Herdiansah dalam tulisannya yang berjudul "Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014" pada tahun 2017 menunjukkan masih kuatnya isu identitas dalam pemilihan umum. Herdiansah dalam kesimpulannya menegaskan bahwa Primordialisme merupakan

sebuah keniscayaan yang akan selalu ada di sebuah negara yang plural. Isu-isu primordialisme tidak dapat dihilangkan di negara-negara tersebut. Namun, primordialisme dapat dikelola dengan menekankan kepada aspek kebersamaan. Adapun, strategi lain yang paling penting dalam menangkal isu-isu primordial adalah penerapan supremasi hukum (Herdiansah, 2017: 197).

Dari ketiga tulisan tersebut, terlihat bahwa masyarakat etnis Tionghoa pasca reformasi memiliki kebebasan berpolitik yang luas dan tidak lagi mendapatkan perilaku diskriminasi. Akan tetapi lingkungan sosial-politik di Indonesia setelah reformasi masih mempergunakan politik identitas sebagai instrumen dalam meraih suara maupun pengaruh dalam masyarakat. Lalu bagaimana peran etnis Tionghoa dalam politik nasional dimana faktor-faktor seperti persepsi, politik identitas, ketiadaan keseragaman politik menjadi penentu peran mereka.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui Studi literatur yang bersumber baik dari jurnal/buku, dokumen resmi, maupun majalah/ koran. Studi literature. dipergunakan untuk menelusuri perkembangan memapar-kan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional dan perubahannya terutama pasca reformasi. Pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan berita yang berkaitan dengan peran serta etnis Tionghoa dalam politik nasional. dalam upaya menjelaskan perubahan peran serta etnis Tionghoa, kajian ini merujuk

pada literatur-literatur politik nasional yang dijadikan perspektif untuk memahami gejala-gejala serupa.

Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa *report* (laporan penelitian) baik yang dikeluarkan lembaga resmi pemerintah dan organisasi internasional maupun yang dikeluarkan lembaga penelitian ekonomi non-pemerintah dan lembaga riset internasional lainnya. Data-data sekunder ini juga akan diperkaya tentunya dari sumber-sumber lain.

Hasil dan Diskusi

Masa Kolonial Belanda

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, masyarakat etnis Tionghoa telah berada di wilayah Nusantara semenjak masa kerajaan dan menempati posisi dalam bidang ekonomi sebagai pedagang perantara oleh penguasa lokal. Kebijakan yang kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengeluarkan kebijakan pemisahan etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia asli. Pemerintah colonial Belanda membagi tipologi masyarakat di kawasan jajahan dengan ras bangsa Eropa (pada umumnya orang Belanda), Bangsa Asia Asing (pada umumnya orang Tionghoa) dan penduduk pribumi (orang Indonesia asli). Akibatnya masyarakat Indonesia memiliki persepsi rasialis dan konsep kebangsaan Indonesia yang dipengaruhi pemikiran rasialis.

Selain kebijakan pemisahan atau pengelompokan masyarakat Indonesia, pemerintah kolonial Belanda memberikan ijin bagi etnis Tionghoa untuk membuka usaha judi, opium, toko

kelontong dan usaha sarang burung wallet sebagai komoditas ekspor ke China (Williams, 1960:24). Pada tahun 1835 dan 1863, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan *zoning* dan *pass system*, kebijakan yang memaksa etnis Tionghoa tidak bisa bergerak secara bebas bahkan untuk melakukan perjalanan kecuali mereka mendapatkan izin dari pemerintah kolonial (Suryadinata, 1993b:81-82). Motif dari kebijakan pengelompokan atau pemisahan tersebut adalah mencegah bersatunya etnis Tionghoa dan etnis asli Indonesia sehingga pemerintah kolonial Belanda bisa mengontrol dan mengelola kekuasaannya.

Implikasinya adalah etnis Tionghoa menempati posisi yang mendua selama masa kolonial Belanda. Pada satu sisi etnis Tionghoa memegang peranan penting dalam ekonomi Kolonial namun pada sisi lain etnis Tionghoa mendapatkan persepsi sebagai “orang lain” karena semakin meningkatnya kecurigaan dan prasangka oleh etnis Indonesia asli.

Kebijakan *zoning* dan *pass system* akhirnya dihapus pada akhir 1910-an namun penghapusan kebijakan tersebut tidak memberikan peningkatan interaksi antara etnis Tionghoa dengan etnis Indonesia asli. Persepsi etnis Indonesia asli (pribumi) terhadap mereka pun tidak berubah sebagai orang asing dan mereka dipercaya memiliki kekuatan ekonomi kuat, eksklusif dan bersifat egois (Suryadinata, 1993b : 78). Persepsi yang menjadi dasar bagi etnis Indonesia lain melihat etnis Tionghoa sebagai sekutu dari kolonial Belanda, persepsi tersebut yang menyulut terjadinya kerusuhan anti

etnis Tionghoa pada awal kemerdekaan (1945-1946) di Jakarta, Bandung, Pontianak, Palembang dan Medan.

Walaupun mendapatkan batasan-batasan yang keras dari pemerintahan kolonial Belanda, tidak berarti etnis Tionghoa menghilangkan orientasi politik mereka. Bahkan orientasi politik mereka tidak seragam, etnis Tionghoa yang mendukung pemerintahan kolonial Belanda adalah Chung Hwa Hui (CHH) sedangkan yang mendukung pergerakan nasional Indonesia tergabung menjadi *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI). Kedua organisasi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi politik etnis Tionghoa memang ada dan tidak seragam seperti yang dipersepsikan oleh kelompok di luar etnis Tionghoa.

Dengan kebijakan-kebijakan yang diskriminasi oleh pemerintah kolonial Belanda, memaksa masyarakat etnis Tionghoa membuat pagar aman dari tekanan luar dan membuat jarak dengan etnis Indonesia asli. Sehingga kohesi yang diperlukan masyarakat untuk maju pun tidak terwujud.

Masa Soekarno

Selama masa pergerakan nasional Indonesia, walaupun nasionalisme Tionghoa muncul sebelum nasionalisme Indonesia, keterlibatan etnis Tionghoa cenderung terbatas. Keterbatasan yang disebabkan oleh tekanan-tekanan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Suryadinata, kelompok nasionalis masyarakat Indonesia asli cenderung memandang etnis Tionghoa sebagai bangsa lain begitu pula sebagian besar etnis Tionghoa yang berada di Indonesia (Suryadinata 2003: 5). Meskipun

beberapa perorangan Tionghoa mencoba mengiden-tifikasikan diri mereka dengan para nasionalis Indonesia.

Orientasi politik etnis Tionghoa pada masa awal kemerdekaan Indonesia, terbagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok yang memiliki orientasi kembali ke daratan China dan kelompok yang ingin menetap di Indonesia. Dua kelompok dengan orientasi yang berbeda ini lahir karena adanya persepsi dari para pemimpin nasional Indonesia yang berpendapat bahwa etnis Tionghoa akan kembali ke daratan China dan adanya kebijakan dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tentang kewarganegaraan yakni setiap warga negara RRT merupakan keturunan dari masyarakat China daratan. Kondisi ini berakibat adanya *dual nationality* bagi etnis Tionghoa di Indonesia.

Soekarno, walaupun tidak eksplisit, berpendapat etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia berdasarkan fakta bahwa orang Tionghoa yang lahir di wilayah Hindia Belanda. Soekarno memperjelas pemikirannya pada bulan Maret 1963 ketika ia berpidato di Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Ia menyatakan secara terbuka bahwa peranakan Cina adalah suku Indonesia. Suku artinya kaki. Bangsa Indonesia memiliki banyak kaki, yang memiliki kaki Jawa, kaki Sunda, kaki Sumatera, kaki Irian, kaki Dayak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki peranakan Cina. Kaki peranakan adalah salah satu dari kaki-kaki bangsa Indonesia (Giok Tjhan dalam Suryadinata 2003:6).

Pada pemilu umum tahun 1955 bahkan terdapat sembilan kursi dalam

konstituante yang diperuntukan bagi etnis Tionghoa Indonesia. Bahkan ada beberapa anggota cabinet selama masa demokrasi parlementer yang berasal dari etnis Tionghoa (Suryadinata, 1992:14). Pemerintah Indonesia pun mengizinkan etnis Tionghoa untuk menunjukkan dan melestarikan identitas budaya Tionghoa, hal ini dikarenakan Presiden Soekarno memiliki hubungan baik dengan RRT dan toleran dengan keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Perilaku pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno mengakui keberadaan identitas budaya etnis Tionghoa akan tetapi dalam konteks ekonomi maupun politik masih terdapat batas-batas. Seperti kebijakan ekonomi "benteng" dan "ali-baba" yang bertujuan untuk memajukan masyarakat etnis Indonesia asli agar bersaing dengan usaha milik etnis Tionghoa. Dalam bidang politik, pada tahun 1958 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, namun UU ini baru berlaku pada tahun 1960. Kemunculan UU kewarganegaraan tersebut mendorong keluarnya Peraturan Presiden No.10 tahun 1959 yang membatasi peran etnis Tionghoa dalam perekonomian di daerah pedesaan dan dicap sebagai "orang asing". Secara politik, kebijakan ini mendorong proses asimiliasi masyarakat etnis Tionghoa ke dalam etnis Indonesia asli dan mendorong pulang etnis Tionghoa kembali ke daratan Cina.

Masa Orde Baru

Terpilihnya Jend. Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara (MPRS), menandakan perubahan besar dalam kebijakan atas masyarakat etnis Tionghoa. Pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi menyeluruh pada etnis Tionghoa (1967-1998). Pemerintahan Soeharto menyatakan bahwa warga negara keturunan Tionghoa harus berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli (Dwipayana dan Hadimadja, 1989:279 dalam Suryadinata 2003:2). Akan tetapi dalam penerapan kebijakan asimilasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia asli berjalan kabur dan berakibat pada semakin terpisahnya etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia asli. Suryadinata memberikan contoh adalah hal toleransi terhadap agama-agama minoritas dan perbedaan antara pribumi dan non-pribumi yang cenderung memilah dan bukan mempersatukan etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia asli.

Pembatasan-pembatasan terhadap masyarakat etnis Tionghoa pun terjadi, etnis Tionghoa tidak diperbolehkan menggunakan nama aslinya dan diharuskan menggunakan nama nasional, tidak diperbolehkan bekerja di bidang militer, keamanan, politik, bahkan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga masyarakat etnis Tionghoa terpaksa untuk bekerja di bidang ekonomi. Praktis peran politik etnis Tionghoa dalam politik nasional maupun daerah begitu terbatas.

Refomasi dan Pemilu 1999

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998, membuka keran kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama ranah sosial-politik.

Muncul lebih dari 100 partai, tiga di antaranya dibentuk oleh masyarakat etnis Tionghoa, ketiga partai tersebut adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) (Suryadinata 2003:3). Akan tetapi tidak semua kelompok etnik Tionghoa menyetujui keterlibatan langsung dalam politik praktis melalui partai politik. Mereka pun lebih menginginkan organisasi sosial non-politik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM pertama adalah Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI yang dikenal sebagai *Yinni Baijixing Xiehui*), yang kemudian bertransformasi menjadi Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia (INTI). Terdapat pula LSM-LSM lain yang dibentuk khusus untuk memberantas diskrimansi rasial di Indonesia (Suryadinata 2003:4).

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru juga membuka lembaran baru bagi Indonesia yakni pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu tahun 1999 ini diikuti oleh 48 partai ini dan antusias masyarakat Indonesia terlihat tinggi begitu pula para elit politik kala itu. Pada pemilu 1999 setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih terkecuali anggota ABRI (TNI) yang tidak boleh menggunakan hak pilih seperti yang diatur pada UU Pemilu Nomor 3 tahun 1999 pasal 30. Pemilu 1999 merupakan pemilu yang tidak memandang pangkat, kedudukan, dan SARA. Masyarakat dari etnis Tionghoa pun ikut serta meramaikan Pemilu 1999 ini. Salah satu faktor pendorong masyarakat etnis Tionghoa antusias pada pemilu 1999 adalah kekecewaan mereka terhadap

pemerintahan Soeharto dengan Golkar. Maka, ketika Pemilu 1999 diselenggarakan, banyak orang Tionghoa yang mengalihkan dukungan kepada PDI-P dan juga kepada partai lain seperti PKB dan PAN. Walaupun yang mendukung Golkar tetap ada, namun jumlahnya bertambah kecil. Sedangkan partai etnis Tionghoa, seperti PARTI dan Partai Pembauran, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang ikut serta hanya PBI-nya Nurdin Purnomo, yang hanya memperoleh satu kursi di DPR 1999-2004. Sebagai akibatnya, etnis Tionghoa lebih cenderung mendukung partai-partai pribumi ketimbang partai etnis (Suryadinata: 2010).

Melihat fakta bahwa para tokoh etnis Tionghoa banyak yang memilih bergabung dalam partai-partai pribumi dibanding partai etnis mereka dikarenakan mereka masih merasa sebagai minoritas yang jumlahnya kecil sehingga apabila tidak bergabung dengan pribumi keberadaan mereka pun tidak akan dianggap. Para elit politik Tionghoa ini pun mungkin masih trauma dengan keributan pada pemilu sebelumnya pada zaman Soeharto dan memikirkan keselamatan mereka apabila terlalu menonjolkan diri dengan mengikuti partai yang berbau "Cina".

Kusuma dan Satya (2006: 65) menyatakan bahwa pada Pemilu 1999 walau ada partai politik yang didirikan oleh orang Tionghoa sendiri, atau partai politik yang membuka diri untuk bergabungnya orang Tionghoa di dalamnya, akan tetapi mayoritas orang Tionghoa masih menunjukkan sikap monoloyalitasnya terhadap partai politik yang dirasa bisa menjamin keamanan dan

kepentingan pribadi, keluarga maupun usahanya. Itu sebabnya partai politik Tionghoa, seperti Parti dan Partai Bhinneka, tidak mendapat cukup suara yang mendukung mereka pada Pemilu 1999 tersebut. Bahkan Parti sama sekali tidak bisa ikut pemilu karena sedikitnya jumlah warga etnis Tionghoa yang mendukung keberadaannya.

Pada pemilu 1999, peran politik masyarakat etnis Tionghoa lebih terlihat dengan bermunculan partai-partai politik berbasis etnis maupun lahirnya organisasi sosial kemasyarakatan yang berdasarkan etnis Tionghoa. Akan tetapi dikarenakan trauma atas perilaku oleh pemerintahan terdahulu, pertimbangan pemilihan partai politik berdasarkan pertimbangan jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha ekonomi mereka.

Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004, tidak satu pun partai etnis Tionghoa yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilu (Suryadinata: 2010). Menurut Setiono dalam (Tempo: 2004) masyarakat Tionghoa skeptis terhadap pemilu 2004. Menurutnya sikap skeptis ini muncul karena banyaknya partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan para pemilih kebingungan dan cenderung bersikap skeptis. Selain itu, tidak semua calon legislatif dari masyarakat Tionghoa mengetahui dan memahami visi misi partai. Tetapi karena ada sedikit kebanggaan, mereka yang memiliki uang menerima tawaran menjadi calon legislatif walaupun mereka hanya mendapatkan nomor urut terakhir. Mengenai banyaknya suara masyarakat Tionghoa yang keluar dari PDIP, Benny

mengatakan suara-suara itu akan lari ke partai-partai nasionalis. Tetapi menurutnya suara warga masyarakat Tionghoa itu tidak sepenuhnya lari ke parpol-parpol yang berisi orang Tionghoa.

Pada Pemilu 2004 muncul ke permukaan suatu fakta bahwa adanya sifat heterogenitas dalam masyarakat etnis Tionghoa. Heterogenitas yang membuktikan bahwa mereka tidak memiliki satu wadah besar yang dapat mereka percayakan dalam pilihan politiknya. Keheterogenitasan ini ternyata membawa dampak lebih buruk dari Pemilu 1999 yang diadakan sebelumnya. Pada Pemilu 1999 masih ada PBI yang lolos verifikasi untuk ikut pemilu, namun di Pemilu 2004 justru satu pun tidak ada partai yang lolos berasal dari partai Tionghoa. Banyak dari elit politik Tionghoa ini yang bahkan tidak memahami visi misi partai seperti yang diungkapkan Setiono sebelumnya. Kebanyakan dari para elit politik Tionghoa ini adalah dari golongan menengah ke atas yang dimanfaatkan untuk menyokong dana pada partai sehingga mereka sering disebut-sebut sebagai "partisipan celengan".

Pernyataan sebelumnya diperkuat dengan temuan dalam riset yang dilakukan Christine Susanna Thjin, peneliti dari CSIS. Ia menyatakan bahwa di pemilu tahun 2004, dinamika etnis Tionghoa semakin dinamis dan asertif, walaupun menurutnya sebagian masyarakat terutama elit politik tampak masih nyaman dengan stigma 2%-70%. Akibatnya dalam pemilu 2004 partisipasi politik komunitas Tionghoa masih

dianggap sebatas 'partisipasi celengan' (Kompas: 2004).

Melihat kenyataan bahwa pada Pemilu 2004 ini elit politik Tionghoa dijadikan dan bersedia menjadi penyokong dana untuk partai tidak jauh berbeda keadaannya pada masa-masa sebelum reformasi. Sejak zaman kolonial para masyarakat Tionghoa dianggap sebagai "*economic animal*" yang segala perbuatannya hanya bertujuan untuk dan dilakukan untuk uang. Sayang sekali pada era Reformasi ini citra tersebut masih muncul di kalangan elit politiknya. Namun tidak semua elit menggunakan uang untuk memperoleh kedudukan di partai, masih banyak elit-elit politik Tionghoa lain yang benar-benar terlibat aktif dalam politik karena rasa kepedulian yang tinggi terhadap nasib bangsa.

Namun pandangan masyarakat etnis Tionghoa sebagai 'partisipan celengan' tidak seluruhnya terlihat, dalam Pemilu 2004, masyarakat etnis Tionghoa tidak lagi hanya sebagai partisan namun banyak dari mereka yang tampil menjadi Calon Anggota Legislatif (caleg) baik melalui mekanisme partai politik maupun melalui mekanisme Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Kusuma dan Satya: 2006). Meskipun tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu, namun jumlah elit politik Tionghoa yang ikut berpartisipasi pada Pemilu 2004 ternyata bertambah besar dari jumlah elit politik Tionghoa yang berpartisipasi pada Pemilu 1999. Peningkatan tersebut terlihat dalam Publikasi media, sepanjang pemilu legislatif dan pilpres 2004 mencatat beberapa perkembangan. Selama pemilu legislatif, sejumlah media mencatat setidaknya 150 calon legislatif Tionghoa,

meskipun pada akhirnya hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan kursi. Di pelbagai daerah muncul berbagai kreasi partisipasi politik yang dulu terasa minim sekali, mulai dari peningkatan keanggotaan partai politik, inisiatif debat/diskusi politik oleh asosiasi Tionghoa, kampanye partai politik, sampai sosialisasi proses pemilu. Selama kampanye pilpres, terlihat kemunculan pelbagai representasi masyarakat Tionghoa baik untuk bersilaturahmi kepada Presiden Megawati maupun SBY. Tim sukses capres pun bergerak dengan dinamika yang berbeda, tetapi relatif lebih asertif ketimbang masa-masa Pemilu sebelumnya. Penyelenggara-an diskusi publik pun meningkat intensitasnya (Kompas: 2004).

Pemilu 2009

Dalam Pemilu 2009 ini, masyarakat etnis Tionghoa dari seluruh Indonesia yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mencapai ratusan orang. Di Jakarta sendiri, tidak kurang dari seratus orang keturunan Tionghoa saling bersaing suara memperebutkan kursi DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) I DKI Jakarta. Para etnis Tionghoa ini berasal dari berbagai profesi, umur, pendidikan, agama, dll. Mereka mencalonkan diri melalui sekitar 13 partai politik dari 44 partai politik peserta Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, masyarakat etnis Tionghoa aktif mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat etnis Tionghoa mulai merasa nyaman dengan situasi politik tanah air dan traumanya akan pemasangan

aspirasinya sudah mulai luntur. Untuk Pemilu 2009, sejumlah caleg dari etnis Tionghoa muncul. Sebutlah Charles Honoris (Dapil Jatim I), L. Walanda (Sulawesi Utara), Tan Fu Yong (DKI Jakarta), Samuel Nitisaputra (Kalimantan Timur), dan Alvin Lie (Jateng).

Menurut Dawis (2004: 196), meskipun partai-partai politik Tionghoa mengalami kelesuan di dasawarsa pertama era Reformasi, orang Indonesia-Tionghoa menjadi lebih aktif dalam pemilu parlemen dan presiden tahun 2009. Surat kabar Singapura, *The Straits Times*, melaporkan bahwa paling sedikit 12 politikus dari etnis Tionghoa, sebagian besar berasal dari partai sekuler nasionalis, berhasil mendapat tempat diantara 560 kursi Parlemen nasional sesudah pemilu legislatif tanggal 9 April 2009, dibandingkan dengan 13 kursi dalam pemilu tahun 2003 dan enam kursi di pemilihan tahun 1999. Disamping itu, penting dicatat bahwa semua calon wakil presiden diminta untuk bertemu dengan organisasi terbesar Tionghoa-INTI dan PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) yang anggotanya meliputi ribuan orang. Orang Indonesia Tionghoa juga datang berduyun-duyun memberikan suara mereka pada pemilu presiden terpilih tanggal 8 Juli 2009.

Eksistensi masyarakat Tionghoa pada Pemilu 2009 mulai diperhitungkan oleh para calon wakil presiden Pemilu 2009. Rupanya mereka ingin menarik minat para masyarakat Tionghoa untuk memilih mereka saat pemilu 2009 berlangsung. Usaha untuk menarik minat ini pun ada yang berhasil. Contoh nyata adalah pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono yang didukung penuh oleh

Federasi Guangdong Se-Indonesia yang anggotanya diklaim berjumlah jutaan orang keturunan Tionghoa.

Pemilu 2014

Pada pemilu 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam keikutsertaan masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilihan calon legislatif, tercatat 315 calon legislatif yang berasal dari etnis Tionghoa. Dibandingkan Pada tahun 2004 terdapat 100 calon legislative yang berasal dari etnis Tionghoa, pada pemilu tahun 2009 terdapat 213 calon legislatif (<http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/04/striving-for-safety/> access-ed 10 Agustus 2018). Saat ini terdapat 18 anggota legislative dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari etnis Tionghoa (PDI-P menjadi partai penyumbang terbesar yakni 14 anggota).

Pasca pemilu 2014, lanskap sosial-politik nasional pun ditandai dengan semakin meningkatnya peran politik masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satunya adalah politikus etnis Tionghoa yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan bupati Belitong Timur dan pada tahun 2014 menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ir. Joko Widodo yang dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kehadiran Ahok memberikan pandangan baru bahwa etnis Tionghoa mampu menjadi pemimpin di daerah masyarakat etnis Tionghoa merupakan minoritas. Ahok tidak hanya memberikan pandangan baru namun juga memberikan terobosan-terobosan kebijakan yang jarang diambil oleh pemimpin yang berasal dari kelompok mayoritas.

Akan tetapi seperti yang dinyatakan Herdiansah (2017) bahwa lanskap politik nasional masih menggunakan politik identitas sebagai alat dalam meraih kekuasaan. Maka keberadaan Ahok pun masih rentan sebagai objek politik identitas, dan terjadi dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 yang menggunakan identitas sebagai alat untuk meraih simpati dari para pemilih.

Namun tidak hanya Ahok yang memperlihatkan perubahan peran serta masyarakat etnis Tionghoa dalam politik nasional. Pada tanggal 7 Februari 2015, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) didirikan oleh Harry Tanoesoedibjo yakni pengusaha berasal dari etnis Tionghoa. Berbeda dengan partai-partai yang berbasis etnis, Perindo berlandaskan Nasionalis dan Pancasila dan memiliki jejaring organisasi yang lebih mapan. Keterlibatan etnis Tionghoa sebagai pimpinan partai politik nasional merupakan hal yang baru sehingga akan memberikan faktor penentu atau pembeda dalam pemilu yang akan datang.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan peran serta masyarakat etnis Tionghoa dalam politik nasional. Pertama adalah kebijakan negara terhadap masyarakat etnis Tionghoa, tidak dapat dipungkiri bahwa sedikitnya masyarakat etnis Tionghoa berkiprah dalam bidang politik dikarenakan kebijakan pemisahan dan asimiliasi yang dipaksakan oleh pemerintah Kolonial Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia. Kedua

adalah persepsi masyarakat etnis Indonesia asli yang memandang bahwa etnis Tionghoa merupakan 'orang lain' dan bukan bagian dari bangsa Indonesia.

Akibatnya adalah minimnya peran politik etnis Tionghoa dalam politik nasional walaupun masih ada beberapa tokoh etnis Tionghoa yang berjasa dalam pergerakan nasional maupun revolusi kemerdekaan. Pasca reformasi 1998 terjadi perubahan dalam kebijakan pemerintah sehingga peran politik etnis Tionghoa mulai meningkat, dan di setiap pemilu pasca reformasi terdapat perbedaan dalam peran mereka. Pada Pemilu 1999 dimana para elit politik Tionghoa mulai muncul ke ranah pemilu, namun masih memilih jalur aman, yaitu mendukung partai-partai "pribumi". Mayoritas masyarakat Tionghoa pada Pemilu 1999 ini mendukung PDI-P karena perasaan senasib.

Pemilu 2004 jumlah elit politik yang berasal dari masyarakat etnis Tionghoa mencalonkan diri menjadi calon legislatif makin besar, namun tidak ada satu pun partai Tionghoa yang lolos verifikasi untuk ikut pemilu. Hal ini dikarenakan belum adanya wadah yang dapat menampung seluruh masyarakat Tionghoa ke dalam satu kekuatan politik. Serta adanya fenomena 'partisipan celengan'. Pemilu 2009 karena iklim politik di Indonesia yang mulai sehat dan adanya perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat etnis Tionghoa, mereka pun semakin memberanikan diri untuk mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Pada periode ini, eksistensi masyarakat Tionghoa sudah lebih dianggap dengan adanya kunjungan dari para calon wakil presiden ke organisasi-organisasi berbasis Tionghoa untuk

menarik dukungan massa Tionghoa. Pada pemilu 2014, terjadi peningkatan signifikan dalam peran politik masyarakat etnis Tionghoa dalam kegiatan politik dan yang menarik adalah pasca pemilu 2014 adalah masyarakat etnis Tionghoa lebih aktif dalam kegiatan politik. Seperti ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan pendirian partai politik, dan terlihat perubahan peran yang tadinya bersifat skeptis dan pasif, mereka pun lebih aktif tidak hanya dalam partai politik namun juga di berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Referensi

- Asmarani, D. (2006). Indonesia Passes Landmark Citizenship Law. *Indonesian Reports – LOG 23(29)*: 1.
- Ananta, Aris, Eva Nurividyia Arifin, M sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, Agus Pramono. (2013). Changing Ethnic Composition: Indonesia, 2000-2010. International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) website. Retrieved 21 November 2017, from http://www.iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/IUSSP%20Ethnicity%20Indonesia%20Poster%20Section%20G%202708%202013%20revised.pdf
- Coppel, Charles A. (1983). *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Dwipayana, G. dan R. K. Hadimadja, (1989). Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Freedman, Amy. (2003). Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia. *Asian Ethnicity* 4(3): 439-452.
- Govaars, Ming. (2005). Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in

- Indonesia, 1900-1942. Singapore: Chinese Heritage Centre.
- Geertz, C. (1965). *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. In C. Geertz, *Old Societies and New States* pp. 105-157. New York: The Free Press.
- Dawis, Aimee. (2004). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Herdiansah, A.G. (2017). Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal BAWASLU* Vol.3, 169-183
- Kusuma, Eddie dan Satya Dharma. (2006.) *Etnis Tionghoa Dalam Politik Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*. Jakarta: Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI) dan Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia.
- Lan, Thung Ju. (2010) *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Neuman, L. (2013). *Social Research Methods 7th Edition*. Boston, USA: Allyn & Bacon.
- Reid, Anthony. (1992). Economic and Social Change, c. 1400-1800. In *The Cambridge History of Southeast Asia Volume One: From Early Times to c. 1800*, ed., Nicholas Tarling, pp. 460-507.
- Reid, Anthony. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Volume Two: Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press.
- Shiraishi, Saya and Takashi Shiraishi. (1993). The Japanese in Colonial Southeast Asia: An Overview. *The Japanese in Colonial Southeast Asia*, eds., Saya Shiraishi and Takashi Shiraishi, pp. 5-20. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.
- Sidel, John T. (2006). *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Ithaca: Cornell University
- Suryadinata, Leo. (1992). *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China*. Singapore: Heinemann Asia.
- Suryadinata, Leo. (1993). "The State and Chinese Minority in Indonesia." In *Chinese Adaptation and Diversity: Essays on Society and Literature in Indonesia, Malaysia & Singapore*, ed., Leo Suryadinata, pp. 77-100. Singapore: Singapore University Press.
- Suryadinata, Leo. (2003). *Kebijakan Negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa : Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 1-12
- Setijadi, Charlotte. (2016). *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia : Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification*. ISEAS Yusof Ishak Institute : 2016 No.12, 1-10